

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya, maka pada bab ini penulis akan menyampaikan beberapa kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai beberapa hal sebagai berikut:

1. Implementasi kebijakan pengawasan intern Inspektorat Jenderal KKP secara umum telah meningkatkan kapabilitas tata kelola APIP Inspektorat Jenderal KKP. Pada setiap faktor, semua kebijakan, proses, dan prosedur audit intern yang relevan telah didefinisikan, didokumentasikan, dan diintegrasikan. Peran dan Layanan Audit Internal (asurans dan konsultasi) yang dilakukan oleh Inspektorat telah berfungsi untuk memberikan penilaian independen dan objektif untuk membantu organisasi dalam mencapai tujuan dan meningkatkan operasi seperti melaksanakan pendampingan kegiatan pengadaan barang dan jasa pada eselon I teknis. Inspektorat Jenderal KKP belum melaksanakan pengelolaan SDM Itjen sesuai pedoman tata kelola pengawasan. Hal tersebut disebabkan, bagian SDM Itjen belum memiliki atau mempunyai data base terkait kebutuhan pendidikan dan pelatihan (diklat) setiap individu pegawai Itjen, baik diklat yang sudah dilaksanakan maupun yang akan dilaksanakan/ kebutuhan, sehingga target kebutuhan 20 jam pelatihan pertahun bagi auditor tercapai dan diklat tersebut juga tepat sasaran. Inspektorat Jenderal KKP telah melaksanakan Praktik Profesional dengan menyusun perencanaan pengawasan berdasarkan penilaian risiko yang merupakan hasil konsultasi dengan manajemen dan unit kerja teknis lainnya. Inspektorat Jenderal KKP telah menyelenggarakan Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja dengan menyusun dan mengembangkan indikator – indikator kinerja dan manual indikator kinerja untuk mengukur dan melaporkan kinerjanya dan melakukan pemanfaatan secara rutin atas pencapaian target guna hasil yang dicapai ekonomis dan efisien. Inspektorat Jenderal KKP juga

telah mengelola Budaya dan Hubungan Organisasi melaksanakan berbagai informasi dan berkoordinasi internal (lingkup KKP) maupun eksternal (BPKP, BPK) terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengawasan sebagai fungsi itjen memberikan layanan penjaminan dan konsultasi. Inspektorat Jenderal KKP telah mengelola Struktur dan Tata Kelola yang mencakup hubungan pelaporan secara administratif dan fungsional dari aktivitas audit internal yang sesuai dengan struktur organisasi dan aturan tata kelola.

2. Faktor – faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pengawasan intern antara lain:
 - a. Komunikasi yang telah dilakukan dalam implementasi kebijakan tata kelola pengawasan internal Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan relatif tidak terjadi hambatan dalam pelaksanaannya. Hal ini disebabkan telah dilaksanakan sosialisasi tata kelola pengawasan internal Itjen KKP, sehingga membuat peluang miskomunikasi antar pimpinan dengan auditor dan antara auditor itu sendiri menjadi sangat kecil. Namun perlu adanya penegasan/kejelasan terkait aturan turunan atau penjabaran dari kebijakan tersebut.
 - b. Keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran merupakan hambatan implementasi kebijakan tata kelola pengawasan internal itjen KKP. Dari sub faktor SDM diketahui bahwa inspektorat jenderal masih kekurangan SDM, sehingga Itjen harus mengoptimalkan SDM yang ada. berdasarkan sumber daya anggaran dibuktikan dengan kecilnya anggaran pengawasan yaitu sebesar 1% dari anggaran program kegiatan KKP yang diawasi selama 5 (tahun) terakhir, maka itjen harus melakukan efisiensi dalam pelaksanaan pengawasan untuk mengantisipasi perubahan kebijakan pengawasan.
 - c. Sikap atau disposisi implementor berkomitmen dalam melaksanakan kebijakan tata kelola pengawasan internal Itjen KKP agar didukung dengan hubungan komunikasi yang berkelanjutan antara semua APIP Itjen KKP dan *stakeholders* terkait sehingga terciptanya kebijakan tata kelola pengawasan internal yang adaptif sesuai kebutuhan kondisi saat ini.

- d. Pelaksanaan implementasi kebijakan tata kelola pengawasan internal inspektorat jenderal KKP dari faktor struktur birokrasi cenderung tidak ada kendala. Hal ini dapat dilihat dari struktur organisasi Inspektorat Jenderal dan telah tersedianya SOP (Standard Operational Procedure) dan berdasarkan wawancara bahwa fragmentation (penyebaran tanggung jawab) sudah berimbang, namun untuk struktur dukungan layanan manajemen/ sekretariat inspektorat perlu penyesuaian terkait perubahan wewenang akibat adanya kebijakan transformasi.
3. Strategi untuk mengatasi faktor penghambat untuk keberhasilan implementasi kebijakan pengawasan intern Itjen KKP.
- a. Perlu meningkatkan sosialisasi secara terjadwal melalui *sharing session* atau FGD dengan tema peraturan - peraturan yang merupakan turunan atau penjabaran dari kebijakan tata kelola pengawasan intern untuk meminimalisir perbedaan pemahaman peraturan tersebut.
 - b. Peningkatan kualitas dan kompetensi para auditor dengan pendidikan dan pelatihan yang tepat sasaran sesuai kompetensi bidang pengawasannya serta mengusulkan penambahan sumber daya manusia (SDM) sesuai kebutuhan latar belakang pendidikan baik secara kualitas maupun kuantitas;
 - c. Melakukan penerimaan mutasi pegawai dari eselon I lainnya untuk ditempatkan sebagai auditor dan diseleksi berdasarkan kompetensinya;
 - d. Melakukan optimalisasi anggaran yang tersedia dengan melakukan kerja sama pengawasan dengan para penyuluhan yang ada di daerah untuk dapat melakukan pemeriksaan kegiatan yang bersifat fisik sesuai daerah domisili penyuluhan.
 - e. Mengevaluasi perencanaan program kerja pengawasan sampai dengan pelaksanaan pengawasan untuk dapat di revisi terkait kegiatan - kegiatan pengawasan yang bepotensi tidak dapat dilaksanakan.

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan yang dikemukakan di atas, maka peneliti menyarankan beberapa saran, yaitu:

1. Saran Praktis

- a. Inspektorat Jenderal KKP agar melakukan penegasan/kejelasan kembali terhadap garis – garis kebijakan pengawasan atau pelaksanaan aturan – aturan yang merupakan turunan atau penjabaran dari kebijakan tata kelola pengawasan intern.
 - b. Meningkatkan kompetensi auditor dengan pendidikan dan pelatihan yang tepat sasaran. Selain itu, mengusulkan penambahan sumber daya manusia (SDM) yang sesuai kebutuhan latar belakang pendidikan, keahlian, ketrampilan dan pengalaman harus sesuai kebutuhan dan formasi.
 - c. Melakukan penerimaan mutasi pegawai dari eselon I lainnya untuk ditempatkan sebagai auditor dan diseleksi berdasarkan kompetensinya;
 - d. Melakukan optimalisasi anggaran yang tersedia dengan melakukan kerja sama pengawasan dengan para penyuluhan yang ada di daerah untuk dapat melakukan pemeriksaan kegiatan yang bersifat fisik sesuai daerah domisili penyuluhan.
 - e. Adanya serangkaian SOP yang harus disesuaikan dengan kondisi saat ini dengan mempertimbangkan pada tujuan yang hendak dicapai, dalam penelitian ini salah satu SOP yang dilakukan dalam implementasi kebijakan pengawasan intern adalah SOP dalam rangka penjaminan kualitas.
 - f. Mengevaluasi mulai dari perencanaan program kerja pengawasan sampai dengan pelaksanaan pengawasan sehingga dapat segera direvisi kegiatan - kegiatan pengawasan yang berpotensi tidak dapat dilaksanakan.
2. Saran Penelitian Selanjutnya
 - a. Bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan kajian yang sama dapat mengembangkan tujuan yang ingin diteliti dan lebih memfokuskan terhadap apa yang diteliti.
 - b. Penelitian selanjutnya diharapkan untuk menambah objek penelitian, yaitu antara beberapa lembaga APIP.
 - c. Peneliti harus memahami tentang fokus kajian yang akan diteliti dengan memperbanyak studi literatur yang berkaitan dengan fokus kajian yang akan diteliti.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab Solichin. 2020. Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Abdul Wahab Solichin. 1997. Analisis kebijaksanaan, dari Formulasi Ke implementasi kebijaksanaan Negara, Jakarta: Edisi Kedua, Bumi Aksara.
- Abidin, Said Zainal. 2016. Kebijakan Publik. Jakarta: Salemba Humanika.
- Afrizal. 2014. Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta: Rajawali Pers.
- Anggi Pramai Sella dan Dr. Lilik Purwanti, M.Si. 2018. Analisis Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Menggunakan Internal Audit Capability Model (Studi Kasus Pada Inspektorat Kabupaten Sidoarjo). Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya. Vol.8. Nomor 1.
- Agustino, Leo. 2016. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.
- Akib, H., 2010. Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa dan Bagaimana, Jurnal. Ilmu Administrasi Publik.
- A. Murni Yusuf. 2014. Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan. Jakarta: Prenadamedia Group
- Arikunto. 2006. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Arikunto, Suharsimi. 2014. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta:
- Atmojo, S. Prajudi. 2006. Administrasi dan Manajemen Umum. Jilid II. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Bachrawi Sanusi. (2004). Pengantar Ekonomi Pembangunan. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Baker, W. E., & Sinkula, J. M. 2005. *Market orientation and the new product paradox. Journal of Product Innovation Management.*
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. 2015. *Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Grand Design Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah 2015 – 2019.*

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. 2015. *Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Penilaian Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.*

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. 2021. *Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penilaian Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Pada Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah.*

Bandi, I.W. 2015. Pengaruh Pengaruh E-Government, Kapabilitas APIP dan Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Terhadap Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia, Jurnal Akuntasni dan Bisnis.

Bagong, Suyanto. 2005. Metode Penelitian Sosial. Jakarta: Kencana Prenanda Media.

Budirahardjo, R., & Baskara, S. A. B. 2019. Revitalizing and Strengthening The Role of APIP In Building Strong Tone At The Top As An Effort To Prevent Corruption In Indonesia. *Asia Pacific Fraud Journal*, 4(2), 139–149. Retrieved from <http://www.apfjournal.or.id/index.php/apf>

Budi Winarno, 2007. Kebijakan Publik: Teori dan Proses, (Edisi Revisi), Yogyakarta: Media Pressindo.

Bungin, M. Burhan. 2007. Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Bungin, M. Burhan. 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Creswell, John W. 2016. Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran. Edisi Keempat (Cetakan Kesatu). Yogyakarta.

Deddy Mulyadi. 2015. Study Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik (Bandung: Alfabeta.

Dessler Gary. 1998. *Management: Leading People and Organizations in the 21st Century* (New Jersey: Prentice-Hall, Inc.)

Emzir. 2012. Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Gulo,W.2004 Metode Penelitian, Jakarta. PT. Grasindo

- Hakim, Muhamad. Heri Kusnanto dan Isnaini (2020).Implementasi Kebijakan Peraturan Kepala BPKP RI nomor 6 Tahun 2015. Jurnal Ilmiah Magister Administrasi publik
- Handoyo, E. 2012. Kebijakan Publik. Semarang: Widya Karya.
- Iskandar, 2009. Metodologi Penelitian Kualitatif. Jakarta: Gaung Persada.
- Islamy, M. Irfan. 2009. Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kalla, Jusuf. (2018). Sindir BPKP, Wapres Minta Lembaga Pengawasan Lebih Efektif. Online.(<https://economy.okezone.com/read/2018/07/17/320/1923394>)
- Keputusan Menteri PANRB nomor 19 Tahun 1996 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya
- Koentjaraningrat. 1986. Pengantar Antropologi Sosial dan Budaya. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Universitas Terbuka.
- Kurniawan, A.R. 2018. Pengaruh Karateristik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- Maryani, Tyarlin. 2017. *Institusionalisasi Internal Audit Capability Model pada Aparat Pengawasan Intern Pemerintah*. Ekonomi Bisnis Vol.22, No. 2, Oktober 2017: 87-102
- Maryati, Tatiek. 2013. Strategi Implementasi Kebijakan Publik dalam Mendorong Percepatan Pengembangan Pengguna Internet. Universitas Sebelas Maret.
- Moleong, Lexy J. 2005. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Moleong, Lexy J. 2013. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Moheriono. 2010. Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi. Surabaya: Ghalia Indonesia
- Mulyadi, D. 2016. Studi Kebijakan Dan Pelayanan Publik. Bandung: Alfabeta
- Narimawati, Umi. 2008. Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif: Teori dan Aplikasi. Bandung: Agung Media
- Nasution, S. 2017. ‘Variabel penelitian’, Raudhah.

- Nugroho. P dan Sugiri, A. 2009. Kebijakan Pembangunan Terhadap Perubahan Tata Ruang di Kota Semarang
- Nugroho,Riant. 2014. Kebijakan Publik di Negara-negara berkembang. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Peraturan Kepala BPKP Nomor: PER-1633/K/JF/2011, tentang pedoman teknis peningkatan kapabilitas pengawasan intern pemerintah. Stop You've done
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025.
- Purwanto, E. A., & Sulistyastuti, D. R. 2012, Implementon Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasinya di Indonesia. Yogyakarta Gave
- Rineka Cipta. Indiahono, Dwiyanto. 2017. Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gava Media.
- Root, Ateven J., 1998. *Beyond COSO Antern Control to Enhance Corporate Governance* (Toronto: John Wiley & Sons, Inc.,).
- Sagara, Y. 2015. Efektivitas Peran Auditor Internal Di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang Ditunjukkan oleh PP No.60 Tahun 2008: Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). *Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, 5(1), 119–132.
- Sekaran, Uma.2006. Metodologi Penelitian. Jakarta : Salemba Empat.
- Setyadi, Rahmad. 2021. Paradigma Baru Pengawasan: APIP sebagai Strategic Partner. www.menpan.go.id/site/berita-terkini/paradigma-baru-pengawasan-apip-sebagai-strategic-partner
- Siagian, Sondang P. 1997. Organisasi, Kepemimpinan dan Perilaku Administrasi. Jakarta. PT. Toko Gunung Agung.
- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi (ed.) 1989. Metode Penelitian Survai. Jakarta: LP3S
- Suandi, I Wayan. 2010. Eksistensi Kebijakan Publik dan Hukum dalam Pemerintahan Daerah. Jurnal Ilmiah Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Udayana Bali. Vol.I No.01
- Sugiyono. 2003, Metode Penelitian Administrasi, Bandung: Alfabeta.

- Sugiyono. 2005. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: CV. Alfabeta.
- Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif. Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: PT Alfabet.
- Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: PT. Alfabet.
- Suharno, 2009. Dasar-Dasar Kebijakan Publik: Kajian dan Analisis Kebijakan. Yogyakarta: Ombak.
- Susanto, AP dan S. Hidajat, 2022. Analisis Pemenuhan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Level 3 pada Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha.
- Sutopo, HB.2006. Penelitian Kualitatif: Dasar Teori dan Terapannya dalam Penelitian, Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Syukur Abdullah, Muhammad. 1988. "Perkembangan dan Penerapan Studi Implementasi (Action Research and Case Studies)," dalam Temu Kaji Posisi dan Peran Ilmu Administrasi dan Manajemen Dalam Pembangunan, LAN, Jakarta.
- Tachjan. (2006). Implementasi Kebijakan Publik. Bandung: AIPI.
- Tahir, Arifin 2014, Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan. Pemerintahan Daerah. Bandung: Alfabeta.
- Tangkilisan, Hesel Nogi, 2003, Kebijakan Publik yang Membumi: Konsep, Strategi dan Kasus. Yogyakarta: YPAPI
- Van Buuren, Arwin. Jenny M Lewis, GuyPeters, William Voorberg. 2020. Improving public policy and administration: exploring the potential of design. Policy & Politics . Vol. 48. No. 1.
- Waluyo. 2007. Manajemen Publik (Konsep, Aplikasi, Dan Implementasi) Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah. Bandung: Mandarmaju
- Yusuf, Murni.2014. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan. Jakarta:Kencana